

Penyuluhan BPJS Ketenagakerjaan pada Pekerja Proyek Bangunan

Sri Rahayu^{1*}, Rahmatika DN²

¹Fakultas Kesehatan, Program Studi Adminkes, Universitas IVET, Semarang, Indonesia

Email: ^{1*}rahayuuby19@gmail.com, ²denanurrahma@gmail.com

(* : coresponding author)

Abstrak–Peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran. BPJS merupakan badan hukum publik yang bertugas melindungi seluruh pekerja terutama Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sangat penting didapatkan karena pekerja proyek bangunan sangat beresiko dalam pekerjaannya. diharapkan tahunya penyuluhan tentang BPJS Ketenagakerjaan yang sangat berguna untuk pekerja proyek bangunan. Metode yang digunakan adalah ceramah dan peragaan cara menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Hasilnya para pekerja proyek sangat antusias dan segera akan menjadi peserta BPJS setelah selesai proyek yang di kerjakannya. Dari salah satu pekerja sudah mempunyai tetapi tidak paham penggunaannya bila punya BPJS. Kesimpulannya pekerja merasa puas dengan adanya penyuluhan dan perhatian dari pimpinan proyek setelah dilakukan penyuluhan BPJS Ketenagakerjaan.

Kata Kunci: BPJS, Resiko Kerja, Pekerja, Perlindungan Diri.

Abstract– BPJS Employment participants are everyone, including foreigners who have worked for a minimum of six months in Indonesia, who have paid their dues. BPJS is a public legal entity tasked with protecting all workers, especially the Work Accident Insurance (JKK) which is very important to obtain because building project workers are very risky in their work. It is hoped that information about BPJS Employment will be very useful for building project workers. The method used is a lecture and demonstration of how to become a BPJS Employment participant. As a result, project workers are very enthusiastic and will soon become BPJS participants after the project they are working on. One of the workers already has it but doesn't understand how to use it if he has BPJS. In conclusion, workers were satisfied with the counseling and attention from the project leader after the BPJS employment counseling was carried out`

Keywords: BPJS, Work Risks, Workers, Personal Protection.

1. PENDAHULUAN

BPJS Ketenagakerjaan merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko dalam pekerjaan tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial.(Setiawan, Harjanti, and Riyoko 2014) Sebagai Lembaga BPJS Ketenagakerjaan sebelumnya bernama Jamsostek (jaminan sosial tenaga kerja), yang dikelola oleh PT. Jamsostek (Persero), namun sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT. Jamsostek berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan sejak tanggal 1 Januari 2014. BPJS Kesehatan, dimana dahulu bernama Askes bersama BPJS Ketenagakerjaan merupakan program pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013.(Belakang 2011) Untuk BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak 1 Juli 2015. Salah satu program BPJS Ketenagakerjaan adalah Jenis Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Selain itu juga Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK), dengan memberikan jaminan dan kewajiban peserta adalah tertib administrasi dan membayar iuran. Sifat dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan adalah wajib, diartikan bahwa setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan dalam undang-undang maka wajib mengikuti program tersebut(Harbullahthabrany n.d.). Sehingga di harapkan sasaran dari program BPJS dapat tercapai dan terwujud, sehingga dinikmati manfaatnya oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Dalam pendampingan ini dilakukan untuk mendukung program publik dari pemerintah. Sehingga paling tidak para pekerja dan pengusaha berkenan untuk mendaftarkan pekerjajanya di lembaga BPJS Ketenagakerjaan.Untuk dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan harus mengetahui tata cara pembayaran premi sampai dengan proses pengajuan klaimnya. Pengusaha dalam hal ini selain mendaftarkan juga menarik iuran dari pekerja dan membayarkan berdasarkan pembagian kewajiban antara pengusaha dan Pekerja.

Kewajiban masing-masing pihak adalah sebagai berikut:

1. Pemberi Kerja:

a. JKK : 0.24% - 1.74 % (sesuai dengan rate kecelakaan kerja berdasarkan lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian)

b. JK : 0.3% c. JHT : 3.7% d. JP : 2%

2. Pekerja:

a. JHT : 2%

b. JP : 1%

Apabila terjadi risiko sosial terhadap pekerja baik itu kecelakaan kerja, kematian, hari tua, maupun pensiun maka BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan pemanfaatannya pada peserta dalam bentuk pelayanan maupun uang tunai. Pemanfaatan pelayanan yang dimaksud adalah apabila terjadi kecelakaan kerja, maka pekerja dapat langsung dibawa ke fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan baik klinik maupun rumah sakit (trauma center) tanpa mengeluarkan biaya dengan menunjukkan kartu BPJS Ketenagakerjaan apabila pemberi kerja (perusahaan) tertib membayarkan iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan. (Dinas Kesehatan Kota Semarang 2018) Apabila tidak terdapat fasilitas kesehatan yang bekerja sama, maka pekerja tetap mendapatkan manfaat JKK tersebut dengan sistem reimbursement. Sedangkan manfaat uang tunai akan didapatkan oleh pekerja maupun ahli warisnya apabila terjadi risiko meninggal dan hari tua/pensiun. Perbedaan antara Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun terletak pada manfaat yang akan diterima oleh pekerja dan /atau ahli warisnya. Manfaat Jaminan Hari Tua diterima sekaligus ketika pekerja memenuhi ketentuan pengambilan yakni usia pensiun (56), meninggal dunia, cacat total tetap, atau berhenti bekerja dan tidak bekerja lagi, sementara untuk manfaat Jaminan Pensiun akan diterima secara berkala setiap bulan kepada Pekerja dan/atau ahli warisnya apabila pekerja memasuki usia pensiun (56) dengan minimal iuran 15 Tahun, meninggal dunia (dengan iuran minimal dibayar 12 bulan), atau cacat total tetap (iuran minimal 1 bulan). (Harbullahthabrany n.d.) Apabila ketiga syarat tersebut belum terpenuhi, maka pekerja dan/atau ahli warisnya akan mendapatkan manfaat berupa akumulasi iuran ditambah dengan pengembangannya. Jumlah pekerja di Indonesia mayoritas bekerja di sektor informal. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2020 jumlah pekerja yang bekerja pada kegiatan informal berjumlah 77,68 juta orang atau (60,47 persen). Data ini menunjukkan bahwa tenaga kerja di Indonesia, lebih mendominasi bekerja di sektor informal. (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah 2020) Dengan banyaknya pekerja yang berkegiatan di sektor informal, maka sudah sewajarnya kalau pemerintah memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap pekerja informal, sebagaimana yang termaktub di dalam Pasal 28 H ayat (3) UUD 1945, bahwa "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat" (Belakang 2011) Dari survey awal dengan pimpinan CV Griya Rencana didapatkan informasi masih diperlukannya BPJS Ketenagakerjaan oleh para pekerja proyek bangunan yang dipimpinya, dengan adanya permintaan oleh pimpinan CV tersebut maka kami tim pengabdian masyarakat Fakultas Kesehatan Universitas IVET memberikan edukasi atau penyuluhan tentang BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja proyek CV Griya Rencana yang beralamat di Jl Solo - Raya Dalon, Desa Sroyo RT 4 RW 4 Jaten Karanganyar. Jumlah para pekerjanya adalah 24 orang yang terdiri dari pekerja kasar 20 orang, pekerja kantor 4 orang dan dipimpin oleh tenaga tehnik yang profesional dan sangat berpengalaman dalam berbagai hal. Pada CV Griya Rencana yang akan berkembang dengan baik dan dalam pemberian hak kepada pekerjanya diatas kewajiban membuat kami memilih CV tersebut sebagai prioritas pertama dalam pengabdian masyarakat yang telah kami programkan.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan pada waktu memberikan edukasi atau penyuluhan di CV Griya Rencana adalah:

2.1 Persiapan

Pada awal akan dilakukan penyuluhan kami kirimkan surat kepada pimpinan CV Griya Rencana beserta kuesioner awal agar diberikan dan di isi terlebih dahulu oleh para pekerjaanya.

2.2. Pelaksanaan

Setelah surat balasan diterima atau di kirimkan ulang ke tim pengabdian masyarakat, kemudian tim pengabdian masyarakat melakukan penyuluhan atau edukasi dengan metode ceramah tanya jawab.(Noviatri 2016) Pelaksanaan di laksanakan sesuai perjanjian kedua pihak antara tim pengabdian masyarakat dengan pimpinan CV. Giya Rencana. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dengan menggunakan metode penyuluhan (Edy Nurcahyo, 2020) yaitu memberikan penjelasan tentang Baan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan kepada para pekerja bangunan CV Griya Rencana.

Hasil Olah data kuesioner yang diisi oleh pekerja proyek bangunan trlihat pada tabel I.

Tabel 1. distribusi frekuensi kesanggupan peserta BPJS Ketenagakaerjaan

Sikap	Kategori	Frekuensi	presentase
sangat sanggup	20-25	6	0.25
sanggup	15-20	14	0.53
tidak sanggup	10-15	4	0.16
sangat tidak sanggup	5-10	0	0

3. HASIL

Pada pelaksanaan pengabdian Masyarakat di CV Graha Rencana diawali dengan perkenalan Tim kepada para pekerja proyek bangunan dan dilanjutkan dengan pemberian materi pada para pekerja proyek bangunan ,didapatkan hasil yang sangat memuaskan dengan antusiasnya para pekerja proyek bangunan dalam menerima penyuluhan atau edukasi yang diberikan oleh tim pengabdian masyarakat Fakultas Kesehatan Universitas IVET . Banyaknya minat untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan membuat Tim pengabdian masyarakat merasa senang dan para pekerja proyek bangunan pun meminta langsung didaftarkan sebagai peserta kepada pimpinan agar pekerja terasa aman dan nyaman dalam melakukan pekerjaannya serta dalam bekerja bekerja mendapatkan keridhoaan Allah SWT dan barokah hasilnya . Pada proses keterlambatan pendaftaran dikarenakan petugas BPJS belum banyak malakukan sosialisasi (Noviatri 2016).



Gambar 1. Tim pengabdian masyarakat peserta pekerja proyek bangunan CV Graha Rencana



Gambar.2 Pemberian Penyuluhan atau edukasi kepada para pekerja proyek Bangunan



Gambar 3. Tim melakukan demonstrasi cara mendaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan



Gambar 4. Tim Memperagakan penggunaan Alat Perlindung Diri

4. KESIMPULAN

Secara keseluruhan kegiatan Pengabdian Masyarakat telah berjalan sesuai dengan rencana dan mendapat tanggapan yang baik dari para pekerja proyek bangunan CV Graha Rencana. Walaupun tujuan untuk mengoptimalkan partisipasi pekerja proyek bangunan dalam keikutsertaan mereka untuk mendaftar jaminan kesehatan melalui BPJS Keenagakerjaan belum serta merta dapat terlaksana dikarenakan terkendala waktu untuk mendaftar ke kantor BPJS Ketenagakerjaan yang memerlukan waktu tersendiri, namun tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kepada para pekerja proyek bangunan CV Graha Rencana tentang BPJS Ketenagakerjaan dan mekanisme pengurusan jaminan kesehatan telah dapat terlaksana dengan baik dan optimal.

REFERENCES

- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2020. "Profil Kesehatan Jateng 2020." 1(1): 33–44. Belakng, Latar. 2011. "No Title p." *Phys. Rev. E*: 24.
- Dinas Kesehatan Kota Semarang. 2018. "Profil Kesehatan Kota Semarang 2018." *Dinkes.Semarang.Go.Id*: 15–68. Harbullahthabrany, Edisikedue. "KesrHRmnr NRsrowRI."
- Noviatri, Lentu Wahyu. 2016. "Analisis Faktor Penyebab Keterlambatan Penyerahan Klaim BPJS Di RS Panti Nugroho Lentu." 1(1): 22–26.
- Setiawan, B., Harjanti, and Riyoko. 2014. "Tinjauan Penyebab Keterlambatan Klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pasien Rawat Jalan Di Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta." *Jurnal Rekam Medis* 8(2): 43–48.
- Suprihatin, E. (2021). Kontekstualisasi Roma 12: 2 Dalam Keniscayaan Dunia Digital. *Fidei: Jurnal Teologi Sistematika dan Praktika*, 4(1), 118-140.